

BAB VIII

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil riset dan pengorganisasian yang dilakukan penulis bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sistem data base desa yang kurang valid sehingga berdampak pada penyaluran dana bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran dan kurang menyelesaikan permasalahan melalui program pengentasan kemiskinan di Desa Sudimoro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam membangun partisipasi masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem data base sosial dan spasial desa yang valid diperlukan sebuah pendekatan secara intensif kepada masyarakat. Dengan inkulturasi, maka dapat memahami kondisi masyarakat sebenarnya dan menganalisis serta merencanakan agenda aksi untuk perubahan sosial. Masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara diberi kepercayaan, dilakukan upaya penyadaran dan diorganisir untuk tindakan aksi. Dengan membangun partisipasi ini, masyarakat ternyata mampu melakukan pemetaan kehidupan mereka, antara lain terkait kondisi sosial dan lingkungan tata ruang dengan pemetaan sosial dan spasial.
2. Pemerintah Desa Sudimoro sebagai pemerintah tertinggi di lingkup pedesaan, dapat ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya tentang manajemen sistem data base. Sebelumnya pemerintah kurang menyadari pentingnya data base, dengan pendekatan dan upaya pengorganisasian pemerintah desa memahami pentingnya sebuah informasi melalui data sebagai bahan pengambilan keputusan

terkait program pembangunan di desa dari pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dilakukan sebuah pelatihan pemetaan sosial spasial dan secara terpisah melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan aparat desa.

3. Salah satu penyebab permasalahan adalah tidak efektifnya jaringan data yang dimiliki masing-masing instansi antara pemerintah desa, kecamatan dan BPS. Maka, perlu dibangun sebuah komunikasi untuk mengefektifkan jaringan data yang ada sehingga penyaluran program pembangunan dapat tepat sasaran dan menyelesaikan persoalan. Upaya ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak pemerintah Kecamatan Tulung dan BPS Klaten yang berada di Kantor Kecamatan Tulung tentang upaya penyelesaian masalah tersebut oleh masyarakat setempat secara partisipatif dengan harapan informasi yang telah diperoleh dari pemetaan baik sosial dan spasial dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan kebijakan.